

Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pembelajaran Sejarah Bermuatan Materi Sejarah Kontroversi di SMA Negeri 5 Semarang

Meilatia Kartikasari, Cahyo Budi Utomo, Syaiful Amin

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan konten pendidikan multikultural pada materi sejarah kontroversi, (2) menjelaskan pelaksanaan pendidikan multikultural pada materi bermuatan sejarah kontroversi oleh guru mata pelajaran sejarah, (3) mendeskripsikan respon siswa terhadap pelaksanaan pendidikan multikultural pada mata pelajaran sejarah bermuatan isu kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada SMA Negeri 5 Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah guru, waka kurikulum, dan siswa dari sekolah tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan penyajian data yang digunakan merupakan analisis terstruktur dan spesifik. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru sejarah di SMA N 5 Semarang sudah mencantumkan mengenai pendidikan multikultural meskipun dalam kurikulum, belum dicantumkan secara tersurat. Siswa dan guru, mayoritas sudah memahami pentingnya pendidikan multikultural dan kaitannya dengan mata pelajaran sejarah bermuatan materi sejarah kontroversi.

Kata kunci: pendidikan multikultural, isu kontroversial, pembelajaran sejarah

ABSTRACT

The purpose of this research is (1) to describe the content of multicultural education on controversial historical material. 2) to explain the implementation of multicultural education on controversial history content material by teacher of history subjects, (3) to describe response toward the implementation of multicultural education on history subjects with controversial issues. This research uses qualitative method with phenomenology approach at SMA Negeri 5 Semarang. Informants in this study were teachers, waka kurikulum, and students from the school. In this research, data collection technique is done by observation interview and documentation. Analysis and presentation of data used is structured and specific analysis. Technique of examination of data validity using triangulasi technique and source. The results showed that the learning planning made by the history teacher in SMA Negeri 5 Semarang has included about multicultural education although in the curriculum has not been written explicitly. Students and teachers, the majority already understand the importance of multicultural education and its relation to historical subject of contested historical material controversy.

Key words: multicultural education, controversial issues, history learning

Korespondensi penulis

Email: sejarah@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa dan diperkaya sekitar 300 kelompok etnis (Wikipedia, 2017). Merupakan jumlah yang sangat besar bagi sebuah negara, membuat Indonesia memiliki beberapa permasalahan serius yang harus dihadapi. Sebanyak kurang lebih 300 kelompok etnis, tentu menyumbangkan lebih dari 200 bahasa dan ragam tradisi yang berbeda. Indonesia juga mengakui 5 agama yang tentu belum termasuk dengan ragam peribadatan yang berbeda.

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. "Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen "aneka ragam" (Kusumohamidjojo, 2000:45). Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar "multikultural nationstate". *Etymologically, multiculturalism derived from words 'multicultural' and 'ism'. Word 'multicultural' has meaning as multi or many cultures. Meanwhile suffix 'ism' has meaning as ideology, concept or tenet (Wasino, 2013).* James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugrah Tuhan/*sunatullah*). Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter (Mahfud, 2016). Sebab

melalui pendidikan multikultural peran individu menjadi pengaruh besar *thus, in multicultural societies, individuals and collectives construct multiple identities, positionality, and agency by constantly negotiating their roles in time and space* (Davis, 2012). Secara sederhana pendidikan multikultural adalah salah satu sarana untuk merespon perubahan demografis dan kultural yang ada pada masyarakat.

Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007: 33) bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Dalam upaya mengatasi masalah multikulturalisme tentu dibutuhkan cara-cara yang efektif dan efisien. Salah satu cara yang dianggap mampu memperbaiki masalah multikulturalisme di Indonesia adalah melalui pelaksanaan pendidikan sejarah, baik sebagai bagian IPS mau pun sebagai mata pelajaran merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan karakter.

Keberhasilan dan kegagalan sudah banyak tertulis oleh sejarah, tinggal bagaimana kita bisa belajar dari proses

yang pernah terjadi tersebut untuk dapat menjadi bangsa yang besar dan mandiri (Amin, 2011). Meskipun program sejarah merupakan salah satu bagian dari orkestra pendidikan karakter, materi pendidikan sejarah yang khas dan penuh dengan nilai memiliki paling memiliki potensi kuat untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang bangsa dan aspirasinya di masa lampau (Hasan, 2012: 81-95). Dengan sifat materi yang demikian, dalam mengembangkan pendidikan karakter, materi pendidikan sejarah melaksanakan fungsi pendidikan sejarah sebagai "*bank of examples for solving present problems and chartering future action*" (Wineburg, 2001) terkis oleh suasana batin bangsa dan keterbatasan kebijakan pendidikan yang menempatkan pengetahuan di atas segalanya.

Pembahasan isu kontroversi dalam sejarah akan berusaha menghilangkan dimensi kebenaran mutlak tanpa diimbangi dengan pembuktian sejarah (Elly, 2008 dalam Sumardiansyah, 2015). Sifat sejarah yang kontroversi memberikan pengaruh dalam pembelajaran sejarah di dalam kelas. Karena, kontroversi adalah suatu kondisi dimana suatu materi memiliki beberapa sudut pandang yang saling berkontradiksi, akan tetapi pandangan-pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama-sama kuat (Purnomo, dkk., 2016). Adanya pembelajaran sejarah kontroversi sebenarnya merupakan suatu keniscayaan. Hal ini karena materi yang menjadi bahan dalam pembelajaran adalah materi yang diangkat dari peristiwa sejarah yang bersifat kontroversi (Ahmad, 2016). Pembahasan isu-isu kontroversi dalam kelas akan mewujudkan suasana masyarakat demokratis yang mampu membangun kesepahaman dan keterbukaan diskusi, serta menumbuhkan nilai toleransi dan kesetaraan. Dengan demikian isu kontroversi mampu

memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang permasalahan dan mendorong kemauan berpartisipasi secara politis (Hess, 2005 dalam Ahmad, 2016).

SMA Negeri 5 Semarang adalah salah satu sekolah menengah negeri di kota Semarang. SMA yang terletak di jalan protokol ini memiliki siswa yang cenderung homogen. Meski begitu, ternyata masih terjadi beberapa permasalahan mengenai multikulturalisme dan toleransi di SMA ini. Dominasi etnis Jawa beragama Islam nyatanya tidak membuat sekolah menengah negeri terlepas dari masalah toleransi.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sejarah tentu sangat berpengaruh terhadap cara pandang siswa. Meski, pembelajaran sejarah yang bermutu merupakan salah satu harapan dan target yang selalu dikejar oleh guru, siswa dan sekolah sebagai institusi pendidikan disamping mutu pembelajaran bidang studi lainnya (Utomo, 2010). Namun, kita masih menanyakan pada siswa-siswa kita pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa, siapa, kapan, dimana, dan paling jauh bagaimana (proses terjadinya). Melihat kenyataan bahwa pada sekolah-sekolah yang sudah terkondisikan keberadaan etnisnya, menjadi cukup menarik bahwa ternyata masih ada masalah multikulturalisme yang harus dibenahi.

Menurut Stephen Hill, pendidikan multikultural dikatakan berhasil apabila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat (Mahfud, 2016). Namun, selama ini tujuan inti dari subjek pendidikan multikultural adalah untuk mencapai pemberdayaan bagi kelompok-kelompok minoritas (Rahim, 2012), padahal kelompok mayoritas yang kuat di suatu tempat tentu harus lebih diberi pemahaman khusus mengenai cara pandang multikulturalisme, sebab nantinya setelah menjadi lulusan sekolah menengah atas negeri,

siswa harus berbaur pada masyarakat luas. Sedangkan, permasalahan di masyarakat saat ini masih sangat terkait dengan homogenitas serta heterogenitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konten pendidikan multikultural pada materi sejarah kontroversi, menjelaskan pelaksanaan pendidikan multikultural pada materi bermuatan sejarah kontroversi oleh guru mata pelajaran sejarah, dan mendeskripsikan respon siswa SMA Negeri 5 Semarang terhadap pelaksanaan pendidikan multikultural pada mata pelajaran sejarah bermuatan isu kontroversi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada SMA Negeri 5 Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah guru, waka kurikulum, dan siswa dari sekolah tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan penyajian data yang digunakan merupakan analisis terstruktur dan spesifik. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber hasil dan pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada 11 program sekolah sebagai sistem sosial yang dituliskan oleh James A. Banks (1) *School policy and politics*, kebijakan dan politik sekolah. Dapat ditemukan pada visi SMA N 5 Semarang yakni "Unggul dalam prestasi, berakhlak mulia dengan menerapkan imtaq dan nilai-nilai karakter bangsa yang berwawasan global". Sedangkan beberapa misinya adalah mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan mengembangkan kemampuan berbahasa asing yang berbudaya untuk mendukung wawasan global.

SMA N 5 Semarang juga memiliki tujuan, yakni "Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia kepada peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membekali ketrampilan hidup agar dapat hidup mandiri serta mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan"

Ditinjau dari visi, misi, serta tujuan lembaga maka SMA N 5 Semarang konsisten mencantumkan mengenai pengembangan karakter bangsa serta penguasaan wawasan global oleh siswa siswinya. Pengembangan karakter bangsa dapat diwujudkan melalui pembelajaran sejarah dengan pendekatan pendidikan multikultural. Siswa dengan kesadaran multikultural tentu akan lebih memperdalam cara pandang dan menghargainya terhadap pengembangan karakter bangsa. Sebab, secara umum pendidikan multikultural mampu dijadikan sarana penanaman sikap persatuan dan kesatuan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Begitupula dengan penguasaan wawasan global. Selain itu melalui wawancara dengan pihak guru, dapat diketahui bahwa sekolah berperan besar dalam mengadakan program-program lintas agama. Contohnya setiap hari besar keagamaan, seluruh siswa mendapat undangan untuk hadir dalam acara tersebut; (2) *School staff: attitudes, perceptions, beliefs, and actions*, staff sekolah: perilaku, cara pandang, kepercayaan, dan perbuatan. Meski warga SMA Negeri 5 Semarang mayoritas homogen, namun berdasarkan Observasi di sekolah, dapat terlihat harmoni antara seluruh warga sekolah tanpa melakukan pembedaan. Hanya sesekali candaan yang menjerus kearah diskriminasi etnis terlihat pada observasi tanggal 30 April 2018. Mengenai candaan tersebut, sudah dikonfirmasi kepada siswa yang bersangkutan maupun guru kelas bahwa tidak terjadi

sentimen etnis atau ras di dalam kelas dan di luar kelas; (3) *Teaching styles and strategies*, cara dan strategi pembelajaran; Beberapa guru sejarah hingga saat ini, merasa ragu untuk mengungkapkan sejarah kontroversi sebagaimana yang mereka pelajari. Versi resmi dari pemerintah dianggap masih menjadi kiblat kebenaran sejarah. Berdasarkan pendapat dari guru mengenai penyampaian salah satu sumber saja – yakni sumber pemerintah – dalam pembelajaran sejarah bermuatan kontroversi, sebenarnya telah dijelaskan dalam buku Sejarah Kontroversial di Indonesia perspektif pendidikan, termasuk kedalam pendekatan *Exclusive partiality* atau guru memperkenalkan dan membela salah satu versi saja (Ahmad, 2016: 206). Padahal sejarawan menemukan banyak versi juga yang seharusnya disampaikan kepada peserta didik. Penyampaian versi-versi ini dijelaskan lebih lanjut dikutip oleh Ahmad dari James, termasuk dalam pendekatan *Committed impartiality* atau guru mengaitkan pembelajaran dengan mendiskusikan isu kontroversial dan menjelaskan satu persatu versi pada siswa (Ahmad, 2016: 206).

Pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara pertama guru dapat mengekspresikan satu versi yang dipercayainya untuk didiskusikan, cara ini bisa ditambahkan dalam metode ceramah seperti yang seringkali digunakan oleh guru sejarah di dalam kelas. Kedua, guru dapat mengemukakan seluruh versi tanpa mengemukakan pendapat pribadinya, di SMA Negeri 5 Semarang sendiri sudah terdapat guru yang melaksanakan langkah ini, biasanya siswa diarahkan untuk browsing melalui internet mengenai versi kemudian baru masuk dalam tahapan diskusi. Ketiga, guru dapat memusatkan seluruh pembelajaran pada siswa dan hanya berperan sebagai penengah – dapat dilakukan dalam metode debat – sehingga

siswa bebas mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki.

Melalui pendekatan dan beberapa strategi yang telah dicantumkan, maka dapat terlihat bahwa keberadaan guru sejarah yang representatif terhadap penerimaan perbedaan tentu sangat dibutuhkan. Dengan demikian, menjadi saling terkait antara pendidikan multikultural dengan pembelajaran sejarah yang spesifik bermuatan materi sejarah kontroversi. Dikuatkan dengan pendapat beberapa ahli dalam buku *Multicultural Education: Issues and Perspectives* bahwa pendidikan multikultural dapat disebut menggunakan istilah lain seperti *critical pedagogy*, *counterhegemonic pedagogy*, or *emancipatory pedagogy* (Erickson dalam Banks and Banks, 2010). Sementara Nuryanto menjelaskan bahwa tujuan dari *Critical Pedagogy* adalah memberdayakan kaum tertindas dan mentransformasi ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat melalui media pendidikan (Ahmad, 2016).

Sementara, melalui pendapat guru yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa versi pemerintah yang paling benar merupakan salah satu tahap awal pembentukan *Cultural Hegemony*. Dimana pendapat dominan akan menjadi rujukan sehingga memberi batasan pada pendapat-pendapat minoritas untuk muncul. *Cultural Hegemony* refers to the established view of things – a commonsense view of what is and why things happen that serves the interest of those people already privileged in a society (Erickson dalam Banks and Banks, 2010: 46).

Pendidikan multikultural sendiri memiliki kesempatan dan tantangan untuk melakukan konter terhadap hegemoni pada kelompok sosial yang ada. Tanpa pandangan-pandangan baru melalui pendidikan multikultural mengenai sejarah

bermuatan materi kontroversi, maka yang akan terjadi adalah

“when issues such as racism, class privilege and sexism are left silent in the classroom, the implicit message for students of color appears to be that the teacher and the school do not acknowledge that experiences of oppression exist.” (Erickson dalam Banks and Banks, 2010: 46)

Dengan kata lain, sekolah akan dipandang menekan daya pikir siswa menuju hal-hal di luar kebiasaan masyarakatnya. Pendapat dari Gustein memberi jalan tengah pada pemikiran Erickson yang sebelumnya disampaikan. Gustein berpendapat bahwa in regards to teaching for social justice, educators often discover a tension between functional literacy and critical literacy (Cho, 2017). Pandangan yang membedakan antara pendidikan kritis dan pendidikan fungsional nampaknya juga menjadi masalah baru dalam pembelajaran pendidikan multikultural. Sebaiknya kedua pendekatan tersebut berjalan seimbang untuk menghasilkan output yang baik dalam dunia pendidikan. antara functional literacy dan critical literacy keduanya harus diterapkan bersamaan dalam pendidikan multikultural.

Sebab, mempelajari *functional literacy* tanpa mengkritisnya tentu akan membuat ketidakadilan sosial menjadi terlupakan. Sementara ketika hanya fokus terhadap critical literacy maka akan membuat siswa menjadi kehilangan kekuatan untuk masuk dalam sistem sosial, ekonomi, maupun pemerintahan nantinya, dalam upaya mengatasi ketidakadilan sosial. Seperti pendapat dari Seghal bahwa *training in multicultural competence has focused on increasing competence in knowledge, awareness, and skills specific to diverse populations* (Adames et al., 2013). Dalam upaya membentuk masyarakat yang terdidik dan

berpendidikan tanpa melupakan realitas sosial, tentu tidak dapat dilaksanakan hanya menggunakan satu sudut pandang pendidikan. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam upaya mencapai tujuan tersebut; (4) *Formalized curriculum and course of study*, kurikulum formal dan sumber belajar; Penerapan pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran di sekolah, meski belum tersurat dalam kurikulum tetapi pelaksanaannya telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat sekolah. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural tidak dituliskan secara langsung dalam kurikulum, melainkan guru lah yang harus menyertakannya sendiri dalam tujuan pembelajaran. Meski begitu, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum menjelaskan bahwa pencantuman tujuan multikulturalisme dalam kurikulum 2013 sudah tersirat dengan baik. Meski memang belum menggunakan kata multikultural, namun tujuan yang ingin dicapai sama. Dalam kurikulum 2013 dicantumkan tujuan kolaborasi sebagai pengganti multikulturalisme (wawancara 15 Mei 2018). Keduanya memiliki arti yang serupa, karena baik multikulturalisme maupun kolaborasi akan menghasilkan siswa-siswi yang dapat bekerja sama dalam satu tim tanpa melakukan identifikasi suku, ras, maupun agama rekan kerjanya.

Kurikulum 2013 memang menyertakan mengenai cara anak berinteraksi, tetapi secara langsung tidak menyinggung pendidikan multikulturalisme. Sehingga, guru dan tenaga pendidik lainnya yang harus memetakan kebutuhan anak terhadap konten materi apa saja yang berkaitan dengan multikulturalisme. Selain itu, keberadaan muatan materi sejarah kontroversi, ternyata dipandang guru sebagai salah satu topik menarik untuk siswa belajar mengenai nilai-nilai dalam multikulturalisme, seperti nilai toleransi dan

nilai demokrasi. (5) *Instructional materials* atau bahan ajar Di SMA N 5 Semarang, siswa memiliki 2 buku pegangan untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kedua buku merupakan pinjaman dari perpustakaan sekolah dan merupakan buku terbitan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Sekilas, kedua buku tersebut nampak seperti buku yang sama. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, perbedaan dari kedua buku tersebut berada pada revisi konten di dalamnya. Buku yang diterbitkan sebelum revisi 2016 bermuatan materi hingga masa Hindu Buddha saja, sementara untuk buku setelah revisi 2016 mencantumkan materi hingga Islamisasi dan silang budaya di Indonesia.

Meninjau hal tersebut, maka persentase keterlibatan materi sejarah Indonesia dalam pendekatan pendidikan multikulturalisme dirangkum secara utuh di buku siswa setelah revisi 2016. Sementara, untuk muatan materi sejarah kontroversi tercantum pada setiap bab pembelajaran di buku tersebut. Misalnya pada bab menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia, letak perbedaan yang dapat dijelaskan melalui salah satu materi bermuatan sejarah kontroversi tersebut adalah mengenai asal-usul manusia purba. Serta dipengaruhi pula pada bagian asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertanyaan dari siswa tentu tidak akan jauh dari kontroversi seputar teori evolusi yang dikemukakan Darwin. Salah satu siswa kelas X IPA 2 bernama Adelia mengemukakan mengenai kebingungannya pada pembahasan tersebut, karena teori manusia purba dianggapnya berbeda antara ilmu sejarah dengan ilmu agama (wawancara, 30 april 2018). Peran pendidikan multikulturalisme di sini dapat terlaksana kurang lebih 50% dalam hal pemahaman terhadap perbedaan teori tersebut.

Pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan di buku siswa juga menyertakan

data-data multikulturalisme yang terjadi di Nusantara. Terlebih pada bagian akulturasi dan perkembangan budaya Islam serta proses integrasi nusantara. Konten pembelajaran sejarah sangat mampu jika dikaitkan dengan pendidikan multikultural, sehingga dapat memancing rasa memiliki budaya bangsa dalam diri siswa. Sebab menurut Avean, siswa kelas XI IPS 1 jika suatu bangsa tidak mengetahui sejarahnya dengan paham multikultural, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang radikal dan cenderung mengagungkan budayanya sendiri (wawancara 4 mei 2018).

Muatan materi sejarah yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai multikultural nampak pula pada buku ajar Sejarah Indonesia milik siswa kelas XI. Pembahasan di kelas XI lebih di dominasi dengan sejarah masa VOC hingga usaha mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karenanya, dibutuhkan penanaman sikap persatuan yang dapat dilakukan menggunakan pendidikan multikultural. Konten mengenai Sumpah Pemuda juga membahas mengenai perbedaan dalam tubuh bangsa yang sebenarnya bisa dipersatukan menggunakan ikatan Indonesia itu sendiri. Penanaman rasa cinta tanah air, saling pengertian dan menghargai (toleransi) juga tercantum pada buku ajar pegangan siswa tersebut.

Selain buku ajar, bahan ajar juga menggunakan presentasi dari guru yang materinya diambil dari berbagai sumber. Sumber internet yang kerap digunakan oleh Bapak Wikky berasal dari laman tirto.id, ada pula buku sumber guru yakni Sejarah Nasional Indonesia 1-6. Siswa pun bebas mengakses sumber-sumber lain selama setelahnya dikonsultasikan dengan guru; (6) *Assessment and testing procedures*, prosedur tes dan penelitian. Pada bagian penilaian, nilai-nilai pendidikan multikulturalisme baru dapat terlihat pada

penilaian afektif atau sikap. Sebab dalam indikator yang dicantumkan dalam RPP, sikap toleransi merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai; (7) *Counselling program*. Pada program konseling belum terlihat adanya pengaruh pendidikan multikultural dengan spesifik pembelajaran sejarah; (8) *Community participation and Input*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi warga sekolah sangat baik dengan pelaksanaan pendidikan multikultural. Sebab mayoritas sudah sepakat bahwa pendidikan multikultural sangat penting bagi bangsa Indonesia. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah merupakan wujud toleransi sebagai pengaruh pendidikan multikultural; (9) *Languages and dialects of the school*. Penggunaan bahasa resmi pembelajaran adalah Bahasa Indonesia, meskipun di SMA Negeri 5 Semarang sendiri memiliki siswa pertukaran pelajar dari luar negeri namun bahasa yang digunakan tetap Bahasa Indonesia dengan sedikit selipan bahasa daerah, yakni Bahasa Jawa; (10) *Learning styles of the school*, gaya pembelajaran di sekolah. Mengenai gaya pembelajaran di sekolah guru mayoritas menggunakan gaya *committed impartiality* atau menjelaskan dan mendiskusikan masing-masing versi sejarah dengan siswa. Namun pada beberapa topik bahasan dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya materi, guru juga melaksanakan gaya belajar satu arah dari guru untuk siswa. Contohnya pada pembelajaran bertujuan review materi seperti yang menjadi objek observasi 30 April dan 4 Mei 2018; (11) *School culture and hidden curriculum*, budaya sekolah dan kurikulum terselubung. *Hidden Curriculum* adalah kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, secara lebih definitif digambarkan sebagai aspek dari sekolah di luar kurikulum yang dipelajari, namun

mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi, dan perilaku siswa (Glatthorn, 1987: 20 dalam Rosyada, 2007: 28). Contoh di SMA Negeri 5 Semarang dapat dilihat pada saat guru menampilkan gambar yang berkaitan dengan perbedaan ras dan agama untuk memancing siswa bertanya, namun pada dasarnya guru kemudian menjelaskan mengenai toleransi pada masa kerajaan Islam di Nusantara. (Banks, 2009: 24).

Tujuan pendidikan multikultural tidak dituliskan secara langsung dalam kurikulum 2013, melainkan guru lah yang harus menyertakannya sendiri dalam tujuan pembelajaran. Meski begitu, Bapak Bambang selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum menjelaskan bahwa pencantuman tujuan multikulturalisme dalam kurikulum 2013 sudah tersirat dengan baik. Meski memang belum menggunakan kata multikultural, namun tujuan yang ingin dicapai sama. Dalam kurikulum 2013 dicantumkan tujuan kolaborasi sebagai pengganti multikulturalisme (wawancara 15 Mei 2018). Keduanya memiliki arti yang serupa, karena baik multikulturalisme maupun kolaborasi akan menghasilkan siswa-siswi yang dapat bekerja sama dalam satu tim tanpa melakukan identifikasi suku, ras, maupun agama rekan kerjanya.

Konten pembelajaran sejarah dengan muatan materi sejarah kontroversi dipelajari baik di kelas X maupun kelas XI jenjang SMA. Di SMA N 5 Semarang, siswa memiliki 2 buku pegangan untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kedua buku merupakan pinjaman dari perpustakaan sekolah dan merupakan buku terbitan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Sekilas, kedua buku tersebut nampak seperti buku yang sama. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, perbedaan dari kedua buku tersebut berada pada revisi konten di dalamnya. Buku yang diterbitkan sebelum

revisi 2016 bermuatan materi hingga masa Hindu Buddha saja, sementara untuk buku setelah revisi 2016 mencantumkan materi hingga Islamisasi dan silang budaya di Indonesia.

Muatan materi sejarah yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai multikultural nampak pula pada buku ajar Sejarah Indonesia milik siswa kelas XI. Pembahasan di kelas XI lebih di dominasi dengan sejarah masa VOC hingga usaha mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karenanya, dibutuhkan penanaman sikap persatuan yang dapat dilakukan menggunakan pendidikan multikultural. Konten mengenai Sumpah Pemuda juga membahas mengenai perbedaan dalam tubuh bangsa yang sebenarnya bisa dipersatukan menggunakan ikatan Indonesia itu sendiri. Penanaman rasa cinta tanah air, saling pengertian dan menghargai (toleransi) juga tercantum pada buku ajar pegangan siswa tersebut.

Kegiatan pembelajaran sejarah di SMA N 5 Semarang dilaksanakan berdasarkan panduan RPP (lampiran) yang sebelumnya telah dibuat oleh guru. Penyusunan RPP idealnya disesuaikan dengan karakter siswa di dalam kelas. Tetapi konsep tersebut nampaknya belum dilaksanakan di SMA N 5 Semarang. Meninjau hal tersebut, maka persentase keterlibatan materi sejarah Indonesia dalam pendekatan pendidikan multikulturalisme dirangkum secara utuh di buku siswa setelah revisi 2016. Sementara, untuk muatan materi sejarah kontroversi tercantum pada setiap bab pembelajaran di buku tersebut. Misalnya pada bab menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia, letak perbedaan yang dapat dijelaskan melalui salah satu materi bermuatan sejarah kontroversi tersebut adalah mengenai asal-usul manusia purba.

Muatan materi sejarah yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai multikultural

nampak pula pada buku ajar Sejarah Indonesia milik siswa kelas XI. Pembahasan di kelas XI lebih di dominasi dengan sejarah masa VOC hingga usaha mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karenanya, dibutuhkan penanaman sikap persatuan yang dapat dilakukan menggunakan pendidikan multikultural. Konten mengenai Sumpah Pemuda juga membahas mengenai perbedaan dalam tubuh bangsa yang sebenarnya bisa dipersatukan menggunakan ikatan Indonesia itu sendiri. Penanaman rasa cinta tanah air, saling pengertian dan menghargai (toleransi) juga tercantum pada buku ajar pegangan siswa tersebut.

Pemahaman guru yang baik, kemudian akan mendukung pelaksanaan pembelajaran sejarah di dalam kelas menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, sehingga siswa terbiasa menghormati dan memiliki sikap toleransi pada perbedaan. Namun, beberapa guru sejarah hingga saat ini, merasa ragu untuk mengungkapkan sejarah kontroversi sebagaimana yang mereka pelajari. Versi resmi dari pemerintah dianggap masih menjadi kiblat kebenaran sejarah. Berdasarkan pendapat dari salah satu guru sejarah SMA N 5 Semarang mengenai penyampaian salah satu sumber saja – yakni sumber pemerintah – dalam pembelajaran sejarah bermuatan kontroversi, sebenarnya telah dijelaskan dalam buku Sejarah Kontroversial di Indonesia perspektif pendidikan, termasuk kedalam pendekatan *Exclusive partiality* atau guru memperkenalkan dan membela salah satu versi saja (Ahmad, 2016). Padahal sejarawan menemukan banyak versi juga yang seharusnya disampaikan kepada peserta didik. Penyampaian versi-versi ini dijelaskan lebih lanjut dikutip oleh Ahmad dari James, termasuk dalam pendekatan *Committed impartiality* atau guru mengaitkan pembelajaran dengan mendiskusikan isu kontroversial

dan menjelaskan satu persatu versi pada siswa (Ahmad, 2016).

Keterkaitan antara pendidikan multikultural dengan pembelajaran sejarah yang spesifik bermuatan materi sejarah kontroversi, dikuatkan dengan pendapat beberapa ahli dalam buku *Multicultural Education: Issues and Perspectives* bahwa pendidikan multikultural dapat disebut menggunakan istilah lain seperti *critical pedagogy*, *counterhegemonic pedagogy*, or *emancipatory pedagogy* (Erickson dalam Banks and Banks, 2010). Dalam *critical pedagogy*, satu kata kunci yang melingkupi keseluruhan landasan, pelaksanaan, dan upaya pencapaian tujuannya adalah adanya “kritik” (Ahmad, 2012). Kritik di sini bisa diartikan seperti penjelasan Nuryanto bahwa tujuan dari *Critical Pedagogy* adalah memberdayakan kaum tertindas dan mentransformasi ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat melalui media pendidikan (Ahmad, 2016). Sementara, melalui pendapat guru yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa versi pemerintah yang paling benar merupakan salah satu tahap awal pembentukan *Cultural Hegemony*. Dimana pendapat dominan akan menjadi rujukan sehingga memberi batasan pada pendapat-pendapat minoritas untuk muncul. *Cultural Hegemony refers to the established view of things – a commonsense view of what is and why things happen that serves the interest of those people already privileged in a society* (Erickson dalam Banks and Banks, 2010).

Pada dasarnya, pendidikan multikultural terjadi sebagai proses menuju keadilan dan kesetaraan sosial. Sehingga, sebagai paradigma umum dipahami bahwa pendekatan paling cocok untuk pendidikan multikultural adalah pembelajaran kritis. Padahal, pendidikan fungsional juga harus diterapkan dengan baik sebab menurut Jenks *functional*

literacy helps students from racially and ethnically marginalized groups gain access to and participate effectively in an open and free market of competitive society (Cho, 2017). Selanjutnya ditambahkan oleh Newmann bahwa *It also equips them with intellectual abilities to analyze, synthesize, and evaluate knowledge and information that can be used as tools for their further investigation of injustices* (Cho, 2017).

Jika merujuk pada pandangan para ahli di atas, sudah jelas bahwa antara *functional literacy* dan *critical literacy* keduanya harus diterapkan bersamaan dalam pendidikan multikultural. Sebab, mempelajari *functional literacy* tanpa mengkritisnya tentu akan membuat ketidakadilan sosial menjadi terlupakan. Sementara ketika hanya fokus terhadap *critical literacy* maka akan membuat siswa menjadi kehilangan kekuatan untuk masuk dalam sistem sosial, ekonomi, maupun pemerintahan nantinya, dalam upaya mengatasi ketidakadilan sosial. Seperti pendapat dari Seghal bahwa *training in multicultural competence has focused on increasing competence in knowledge, awareness, and skills specific to diverse populations* (Adames et al., 2013). Dalam upaya membentuk masyarakat yang terdidik dan berpendidikan tanpa melupakan realitas sosial, tentu tidak dapat dilaksanakan hanya menggunakan satu sudut pandang pendidikan. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

SIMPULAN

Konten pendidikan multikultural pada materi sejarah kontroversi di SMA Negeri 5 Semarang cukup disadari keberadaannya baik oleh guru maupun siswa di dalam kelas. Beberapa konten bahkan dibahas terus menerus di dalam

kelas sebagai penunjang pembelajaran dan memantik minat belajar siswa.

Pelaksanaan pendidikan multikultural pada materi bermuatan sejarah kontroversi oleh guru mata pelajaran sejarah sudah cukup baik. Sebab guru sadar dan berupaya meningkatkan pengetahuan multikultural maupun materi ajar untuk sejarah bermuatan kontroversi. Karena, pada dasarnya pendidikan multikultural maupun sejarah bermuatan kontroversi memiliki kesamaan cara berpikir, yakni melalui pendekatan cara berpikir kritis.

Pelaksanaan cara berpikir kritis paling dapat terlihat dari metode yang digunakan guru selama pembelajaran, beberapa melaksanakan metode debat yang membuka pintu pengetahuan baru dalam pribadi siswa. Selain menggunakan metode debat, guru juga memilih menggunakan sedikit metode ceramah dan metode diskusi. Biasanya guru akan menginstruksikan pada siswa untuk *browsing* atau mencari informasi dahulu melalui internet, baru kemudian dibahas bersama di dalam kelas. Meskipun belum dicantumkan secara resmi dalam kurikulum, namun guru berupaya memperkenalkan multikulturalisme kepada siswa.

Respon siswa SMA Negeri 5 Semarang terhadap pelaksanaan pendidikan multikultural pada mata pelajaran sejarah bermuatan isu kontroversi juga cukup baik. Meskipun beberapa siswa mengaku tidak paham mengenai multikulturalisme, tetapi seluruh narasumber meyakini bahwa pengetahuan tentang kultur dan perbedaan-perbedaan di Indonesia sangat penting. Siswa juga terbuka dalam menanggapi isu-isu kontroversi yang menyebabkan perbedaan versi dalam sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Tsabit Azinar. 2016. *Sejarah Kontroversi di Indonesia Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Obor.

Kusumohamidjojo, B. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.

Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad, Tsabit Azinar. 2012. *Pembelajaran Sejarah Dalam Perspektif Critical Pedagogy*. Semarang: Historia Pedagogia, Vol.1, No.1: 64-73.

Amin, Syaiful. 2011. *Pewarisan Nilai Sejarah Lokal Melalui Pembelajaran Sejarah Jalur Formal dan Informal Pada Siswa SMA di Kudus Kulon*. Semarang: Paramita, Vol.1, No.1: 105-115.

Cho, H. 2017. *Navigating the Meanings of Social Justice, Teaching for Social Justice, and Multicultural Education*. Korea Selatan: *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 19, No.2: 1-19.

Davis, K. 2012. *Multicultural Education as Community Engagement: Policies and Planning in a Transnational Era*. Amerika Serikat: *International Journal of Multicultural Education*, Vol.14, No.3: 1-25.

Hasan, S. 2012. *Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter*. Semarang: Paramita, Vol. 22, No. 1: 81-95.

Purnomo, A., Muntholib, A., Amin, S. 2016. *Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Ips) Pada Materi Kontroversi (Controversy Issues) Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Kota Semarang*. Semarang: Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 33, No.1: 13-25.

Sumardiansyah. 2015. *Paradigma dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversi*. Jakarta: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.4, No.2: 77-88.

Utomo, Cahyo Budi. 2010. *Implementasi TQM Berorientasi Hard Skill Dan Soft Skill Dalam Pembelajaran Sejarah Sma di Kota Semarang*. Semarang: Paramita, Vol.20, No.1: 72-81.

- Wasino. 2013. *Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism*. Semarang: Paramita, Vol.23, No.2: 148-155.
- Winarsih, I., Utomo, C.B., Ahmad, T.A. 2017. *Peranan Pembelajaran Sejarah dalam Penanaman Nilai Karakter Religius dan Nasionalisme di MAN Temanggung Tahun Ajaran 2016/2017*. *Indonesian Journal of History Education*, Vol.5, No.2: 22-29.
- Wawancara tanggal 30 April 2018, dengan Adelia siswa kelas X IPA 2.
- Wawancara tanggal 4 Mei 2018, dengan Avean siswa kelas XI IPS 1.
- Wawancara tanggal 15 Mei 2018, dengan Bapak Bambang Waka Kurikulum.